



Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Informasi *Forward-Looking*

Erstine Erdianti¹, Lindrawati Lindrawati^{2*}, Adi Susanto³ 

Jurusan Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2023-05-07

Revised: 2023-08-15

Accepted: 2023-09-08

Available Online: 2023-12-25

Kata Kunci:

Pengungkapan informasi *forward-looking*; mekanisme tata kelola perusahaan; komisaris independen; kepemilikan manajerial; komite audit

Keywords:

Forward-looking information disclosure; *corporate governance mechanism*; *independent commissioners*; *managerial ownership*; *audit committee*

DOI:

<https://doi.org/10.38043/jiab.v8i2.5583>

ABSTRAK

Laporan keuangan merupakan informasi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen ke investor. Laporan keuangan bersifat historis dimana meskipun informasi yang ada dapat digunakan sebagai prediksi masa depan, namun manajemen sebagai pihak internal perusahaan yang lebih paham kondisi perusahaan akan lebih baik apabila juga mengungkapkan informasi *forward-looking* dalam rangka memenuhi kebutuhan investor untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan prospek perusahaan di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan meliputi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*. Disain penelitian kuantitatif, menggunakan data laporan tahunan. Obyek penelitian digunakan perusahaan manufaktur di BEI. Teknis analisis data berupa analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme tata kelola perusahaan yang diwakili komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*. Mekanisme tata kelola perusahaan diwakili kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*, hal ini menunjukkan semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial dan semakin rutin rapat komite audit mampu meningkatkan pengungkapan informasi *forward-looking*. Dari hasil penelitian, komisaris independen diharapkan dapat lebih memaksimalkan perannya sebagai pengawas dan mendorong manajemen mengungkapkan informasi selengkap mungkin, termasuk informasi *forward-looking*.

ABSTRACT

Financial statements are important information as a form of management responsibility to investors. The financial statements are historical in nature where although the existing information can be used as future predictions, management as an internal party of the company who understands the condition of the company better if it also presents *forward-looking* information disclosures to meet the needs of investors in making decisions by considering the company's prospects in the future. This research aims to prove empirically the effect of corporate governance mechanisms which includes independent commissioners, managerial ownership, and audit committees on *forward-looking* information disclosure. Research design is quantitative research with use data of annual report. Research object is manufacturing companies which listed in Indonesian Stock Exchange. Technical analysis of the data used is the analysis of multiple linear regression. The research results show that the corporate governance mechanisms represented by independent commissioners has no effect on the forward-looking information disclosure. The corporate governance mechanisms represented by managerial ownership and the audit committee has a positive effect on the forward-looking information disclosure which made by management, this shows that the greater share ownership by managerial and the more frequent meetings held by the audit committee will increase the disclosure of forward-looking information carried out by management. From the research results, it is hoped that independent commissioners can maximize their role as supervisors and encourage management to disclose as complete information as possible, including forward-looking information.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Perusahaan dalam perjalanan bisnisnya bertujuan mencapai laba yang sebesar-besarnya agar publik dapat menilai kinerja perusahaan baik. Dua pihak yang ada di dalam perusahaan terdiri dari pemilik dana yaitu investor dan pengelola perusahaan yaitu manajer. Pihak investor tidak dapat secara langsung mengawasi dan mengontrol jalannya perusahaan karena tidak mempunyai waktu serta kemampuan secara langsung, namun investor perlu mengawasi jalannya perusahaan maka investor membuat suatu kontrak dengan manajer, dengan begitu investor dapat melakukan kontrol di dalam perusahaan, kemudian manajer akan diberi imbalan atas pekerjaannya, maka terjadilah hubungan keagenan yang dilandasi oleh teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan kontrak antara 2 pihak, yaitu prinsipal memberi penugasan ke agen agar menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh prinsipal

* Corresponding Author: lindrawati@ukwms.ac.id

serta menyerahkan wewenang untuk pengambilan keputusan secara maksimal mewakili prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Terbentuknya kontrak manajer dan investor yaitu dimana segala aktivitas manajer dipertanggungjawabkan pada investor berupa laporan keuangan. Suatu kontrak akan efisien apabila memenuhi dua faktor, di mana faktor pertama adalah agen dan prinsipal memiliki informasi yang transparan dan berkualitas, serta faktor kedua adalah manajer mendapatkan informasi yang jelas tentang imbalan yang akan diterima. Menicucci & Guido (2018) mengatakan terdapat kedudukan yang berbeda antara prinsipal dan manajer sehingga faktor pertama kurang bisa terpenuhi, penyebabnya adalah manajer dapat melakukan pengawasan secara langsung di dalam perusahaan dengan begitu dapat mengakses informasi internal perusahaan secara penuh, di lain pihak, prinsipal kurang memiliki informasi juga tidak dapat mengendalikan perusahaan secara langsung karena tidak memiliki wewenang. Hal ini dapat memicu terjadinya asimetri informasi dikarenakan kontrak yang tidak efisien.

Asimetri informasi dapat timbul karena akses informasi perusahaan yang dimiliki manajer berperan dalam pengendalian aktivitas operasional perusahaan secara langsung sedangkan investor tidak memiliki informasi yang sama (Ajibola, 2017). Agar kepercayaan prinsipal kepada manajer meningkat, maka manajer didorong oleh prinsipal untuk mengungkapkan informasi yang jelas berupa laporan keuangan, dimana komponennya ada lima antara lain: (1) laporan laba rugi; (2) laporan perubahan ekuitas; (3) laporan posisi keuangan; (4) laporan arus kas; serta (5) catatan atas laporan keuangan (Kieso et al., 2021). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada bagian kerangka konseptual menyebutkan ada dua karakteristik kualitatif untuk informasi keuangan yaitu karakteristik fundamental serta karakteristik peningkat. Pada karakteristik fundamental harus memenuhi relevan serta ketepatan penyajian. Suatu informasi memenuhi karakteristik relevan apabila mampu melakukan evaluasi atas peristiwa masa lalu, peristiwa saat ini, dan peristiwa mendatang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Informasi yang menunjukkan masa lalu dianggap kurang mampu menggambarkan keberhasilan, peluang, risiko, dan rencana dari manajemen yang diharapkan oleh investor. Investor memerlukan suatu informasi dimana dapat mengestimasi masa depan perusahaan serta risiko-risiko yang akan dihadapi berupa informasi *forward-looking*.

Informasi *forward-looking* dapat menunjukkan gambaran mengenai kondisi bisnis suatu perusahaan di masa mendatang. Prediksi pendapatan di masa yang akan datang diyakini dimiliki oleh informasi *forward-looking* dan dapat menghasilkan keputusan investasi dengan tepat (Alkhatib, 2014). Pengungkapan informasi *forward-looking* berupa: perkiraan keuangan, target pendapatan, antisipasi arus kas, informasi non keuangan seperti mengenai risiko perusahaan di masa depan serta adanya ketidakpastian dimana dapat memengaruhi perusahaan. Informasi mengenai *forward-looking* telah diatur di Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2016c), di mana informasi *forward-looking* dapat diungkapkan pada beberapa laporan, seperti laporan direktur, laporan dewan komisaris, diskusi, serta analisis dan diskusi manajemen. Kelemahan peraturan tersebut di mana belum jelas tertera sanksi apabila tidak ditaati oleh perusahaan (Maghfira & Tresnaningsih, 2018). Pengungkapan informasi *forward-looking* di Indonesia dalam kenyataannya masihlah rendah meskipun sudah diatur Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan pengungkapan atas informasi *forward-looking* tercatat sebesar 32,6% (Maghfira & Tresnaningsih, 2018), hal ini juga didukung penelitian Dzaraly et al. (2018) dimana pengungkapan informasi *forward-looking* sebesar 31,78% dan penelitian Putri (2019) sebesar 44%. Rendahnya pengungkapan informasi *forward-looking* dikarenakan masa depan yang sulit untuk diprediksi serta kekhawatiran timbulnya biaya litigasi apabila salah pengungkapan, oleh karena itu manajer enggan melakukan (Healy & Palepu, 2001).

Di awal tahun 2020, Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI turun mencapai 5,09% apabila dibandingkan dengan tahun 2019 (Ulfah, 2020), dan salah satu penyebabnya yaitu adanya pandemi virus covid dimana kondisi ini berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan sehingga memengaruhi laporan keuangan dan tahunan perusahaan. Kondisi ini sebenarnya terjadi pada saat belum terbitnya laporan keuangan 2019 sehingga pada laporan keuangan 2019 kondisi keuangan perusahaan baik-baik saja, namun realitanya di tahun 2020 terjadi kondisi yang buruk yang tidak tercantum dalam laporan keuangan 2019. Dalam mengatasi masalah tersebut, pihak manajemen perusahaan dan pemerintah memiliki tugas untuk mempersiapkan laporan keuangan berisi informasi *forward-looking* guna mengurangi kerugian yang terjadi. Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan dengan cara meningkatkan penilaian atas *forward-looking* yang dilakukan di lembaga jasa keuangan supaya mempertahankan stabilitas bisnis suatu perusahaan pada saat terjadi pandemi covid dimana terdapat ancaman pada pelemahan ekonomi (Ramli, 2020).

Pada pelaksanaannya, pengungkapan informasi *forward-looking* dapat timbul apabila tata kelola suatu perusahaan berjalan dengan baik. Tata kelola perusahaan merupakan sistem dalam rangka mengawasi serta mengelola proses atas penerbitan saham, selain itu juga bentuk perhatian dari investor, pihak internal, serta publik (Tunggal, 2012). Tata kelola perusahaan berlandaskan prinsip-prinsip: akuntabilitas, transparan, responsibilitas, independen, kewajaran, serta kesetaraan. Diperlukan suatu mekanisme supaya tata kelola perusahaan dapat berjalan sesuai prinsip-prinsipnya. Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan kebijakan, aturan, urutan proses, dan lembaga dimana memberikan dampak atas pengelolaan, pengarahan, serta pengendalian. Mekanisme ini berkaitan dengan pihak-pihak yang berperan untuk terlaksananya tata kelola di perusahaan dengan baik meliputi: kepemilikan oleh manajerial, kepemilikan oleh institusional, komposisi dari dewan komisaris

independen, dan kompetensi dari komite audit (Ginting, 2016). Penelitian ini menggunakan mekanisme tata kelola yang diwakili oleh komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis mekanisme tata kelola perusahaan meliputi kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*.

Komisaris independen merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris di mana berasal dari pihak di luar emiten atau perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Komisaris independen harus bebas atas hubungan bisnis di mana mampu mempengaruhi independensinya sehingga nantinya tidak menjalankan tugasnya berdasarkan tujuan perusahaan saja (Dzaraly et al., 2018). Keberadaan dari komisaris independen akan memberikan informasi lebih lengkap termasuk pengungkapan informasi *forward-looking* (Fama & Jensen, 1983; Muliawati & Rohman, 2018; Putri, 2019; Taliyang & Jusop, 2011). Sebaliknya menurut Novia et al. (2021), komisaris independen terbukti tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan informasi *forward-looking*. Walaupun perusahaan memiliki komisaris independen namun prakteknya tidak sungguh-sungguh independen, di mana komisaris independen dianggap masih mempunyai kepentingan sepihak.

Kepemilikan manajerial diartikan sebagai saham perusahaan yang dimiliki manajer yang berperan serta secara aktif pada pengambilan keputusan suatu perusahaan (Imanta & Satwiko, 2011; Wardana et al., 2023). Manajer yang memiliki kepemilikan saham akan memiliki efek positif untuk perusahaan dikarenakan manajer merasa lebih memiliki tanggung jawab atas perusahaan karena ikut dalam kepemilikan saham, sehingga manajer diharapkan untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya termasuk informasi *forward-looking* (Arianpoor et al., 2023; Muliawati & Rohman, 2018). Berbeda dengan Liu (2015) yang berpendapat bahwa kepemilikan saham oleh manajer tidak memiliki dampak pada pengungkapan informasi *forward-looking* dikarenakan kepemilikan saham oleh manajer terlalu kecil maka manajer akan enggan mengungkapkan informasi *forward-looking* dikarenakan tidak mendapat keuntungan walaupun mengungkapkan informasi *forward-looking*. Demikian pula hasil penelitian Dzaraly et al. (2018) yang justru menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi *forward-looking* dengan argumentasi masih *non-mandatory*.

Komite audit ialah suatu kelompok individu di mana bertanggung jawab pada dewan komisaris dalam rangka mempermudah fungsi dan tugas yang dijalankan dari dewan komisaris. Komite audit memiliki fungsi mengawasi semua kegiatan perusahaan untuk mencegah terjadinya risiko kecurangan yang dilakukan manajemen (Ahmad & Sari, 2017). Anggota komite audit setidaknya harus ada satu anggota dengan latar belakang ilmu keuangan ataupun akuntansi agar memiliki kompetensi dalam melakukan evaluasi atas laporan keuangan serta memiliki pemahaman atas penilaian dan pendapat dari auditor. Komite audit wajib melakukan rapat secara rutin sehingga pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien. Mekanisme pengawasan dan pengendalian akan semakin baik ketika frekuensi pertemuan komite audit rutin diadakan, semakin besar ukuran dari komite audit, serta keahlian akuntansi dan keuangan yang dikuasai komite audit, sehingga mampu mendorong manajer untuk melakukan suatu pengungkapan dengan transparan, salah satunya pengungkapan informasi *forward-looking* (Abad & Bravo, 2018; Dzaraly et al., 2018; Liu, 2015; Novia et al., 2021; Putri, 2019; Rifai & Siregar, 2019). Di sisi lain, penelitian Ajibola (2017) dan Saha & Kabra (2022) menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan informasi *forward-looking* di mana komite audit masih belum efektif dalam menjalankan tugasnya.

Teori Keagenan

Teori keagenan menunjukkan suatu hubungan kontraktual di antara agen dan prinsipal (Supriyono, 2018). Hubungan agensi merupakan suatu kontrak satu orang atau lebih prinsipal yang memberikan wewenang pada agen untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memenuhi kepentingan pihak prinsipal, salah satunya mendelegasikan pengambilan keputusan pada agen (Jensen & Meckling, 1976). Relasi agen dan prinsipal harusnya menguntungkan satu sama lain, namun agen seringkali bertindak sesuai kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan pemegang saham (Rendi & Suranta, 2017). Tiga asumsi dari sifat dasar manusia dalam menguraikan teori keagenan yaitu keterbatasan pikiran manusia atas masa depan, manusia akan selalu menghindari risiko, dan sifat dasar manusia mementingkan diri sendiri (Eisenhardt, 1989) yang menimbulkan konflik keagenan. Di sisi lain, informasi yang dimiliki kedua pihak seringkali tidak seimbang di mana agen tentunya memiliki informasi lebih banyak dibanding prinsipal sehingga timbul asimetri informasi. Evaluasi investor atas pengelolaan dana dapat melalui pengungkapan laporan keuangan serta informasi lainnya, karena pengungkapan dapat menunjukkan transparansi dan kinerja manajer (Sembiring, 2017). Laporan keuangan memiliki keterbatasan yaitu sifatnya yang historis sehingga *backward looking*, di lain pihak investor memerlukan informasi masa depan, oleh karena itu diperlukan pengungkapan informasi *forward-looking* yang menunjukkan prediksi tentang bisnis perusahaan di masa depan serta risiko yang kemungkinan dapat terjadi di perusahaan. Oleh karena itu, pengungkapan informasi baik *backward looking* maupun *forward looking* dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemakai informasi (Aditya & Meiranto, 2015).

Pengungkapan

Pengungkapan merupakan bagian integral laporan keuangan, di mana pengungkapan adalah tahap akhir dari siklus akuntansi, di mana menyajikan informasi tentang kondisi perusahaan dengan penuh di laporan keuangan. Menurut [Suwardjono \(2017\)](#), pengertian pengungkapan hanya pada hal yang terkait pelaporan keuangan berdasarkan *Financial Accounting Standart Board*, diantaranya: (1) *Statement* Keuangan; (2) Informasi Pelengkap; (3) Catatan Atas Laporan Keuangan; (4) Sarana Pelaporan Keuangan Lain; dan (5) Informasi Lainnya. Tujuan pengungkapan yaitu penyajian informasi yang dirasa penting untuk pemangku kepentingan perusahaan sebagai entitas bisnis. Sebagai timbal baik perusahaan kepada investor dengan tujuan perlindungan, informatif, dan pelayanan atas kebutuhan khusus diperlukan pengungkapan atas informasi perusahaan. Tujuan pengungkapan kepada investor ([Suwardjono, 2017](#)) ada tiga yaitu (1) Perlindungan, yaitu untuk melindungi perilaku manajemen yang dapat dikatakan kurang transparan dan adil; (2) Informatif yaitu pengungkapan diharapkan dapat mengandung informasi guna membantu pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan; dan (3) Kebutuhan Khusus yaitu gabungan tujuan perlindungan dan tujuan informatif. Perusahaan sebagai entitas bisnis akan berupaya untuk menyediakan informasi kepada investor dan pengguna, termasuk pengungkapan informasi *forward-looking*, sebagai perlindungan agar investor dapat mempercayakan dana dalam proses investasi.

Laporan Tahunan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [Nomor 29/PJOK.04/2016](#) menyatakan bahwasanya laporan tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris serta Dewan Direksi yang bertujuan untuk mengawasi Emiten atau Perusahaan Publik selama satu tahun buku pada Rapat Umum Pemegang Saham dan disusun dengan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ([Otoritas Jasa Keuangan, 2016a](#)). Laporan tahunan adalah laporan komprehensif yang meliputi kegiatan perusahaan sepanjang tahun sebelumnya disertai dengan analisis manajemen atas posisi keuangan perusahaan sekarang dan rencana di masa mendatang ([Priharjo, 2020](#)). Karakteristik kualitatif dari pelaporan keuangan merupakan ukuran normatif yang diterapkan di informasi akuntansi, dimana karakteristik fundamentalnya meliputi relevansi serta ketepatan representasi ([Kustiani, 2018](#)), kemudian untuk karakteristik peningkat yaitu dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, serta mudah untuk dipahami ([Ikatan Akuntan Indonesia, 2022](#)). [Goenawan et al. \(2012\)](#) menjelaskan bahwa relevansi dari laporan keuangan dapat memberikan umpan balik serta prediksi. Prediksi dapat didukung dengan adanya pengungkapan informasi *forward-looking*. Komponen Laporan Tahunan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [Nomor 29/PJOK.04/2016](#) minimal memiliki ikhtisar data keuangan penting, informasi saham, laporan Direksi, laporan Dewan Komisaris, profil emiten/perusahaan publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola, tanggung jawab sosial dan lingkungan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, serta surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengenai tanggung jawab Laporan Tahunan ([Otoritas Jasa Keuangan, 2016a](#)). Tujuan utama dari pelaporan keuangan ialah menyajikan informasi yang diharapkan bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi ([CFA Institute, 2014](#)).

Pengungkapan Informasi Forward-Looking

Pengungkapan informasi *forward-looking* menunjukkan gambaran atas informasi masa depan. Informasi *forward-looking* menunjukkan kondisi berdasarkan pada rencana tahun berjalan serta perkiraan masa depan di mana dapat dimanfaatkan investor untuk memprediksi kinerja keuangan suatu perusahaan ([Rahmawati, 2015](#)). Informasi *forward-looking* menunjukkan perkiraan keuangan antara lain perkiraan pendapatan, volume penjualan, dan arus kas; serta perkiraan non-keuangan antara lain ketidakpastian masa depan, hubungan agensi, risiko-risiko masa depan, operasional perusahaan, analisis dan evaluasi ([Alkhatib, 2014](#)). Informasi *forward-looking* dapat diungkapkan pada laporan tahunan di mana mengandung informasi mengenai prospek dan rencana perusahaan di masa depan serta risiko-risiko yang mungkin akan terjadi ([Aljifri & Hussainey, 2007](#)). Transparansi perusahaan dapat meningkat karena adanya pengungkapan informasi *forward-looking* sehingga tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan semakin tinggi, dan ini diharapkan mampu meminimalkan timbulnya asimetri informasi antar investor dan manajer ([Uyar & Karamahmutoglu, 2012](#)).

[Corporate Financial Institute \(2015\)](#) menyebutkan bahwa informasi *forward-looking* akan diakui oleh perusahaan saat memberikan suatu pernyataan baik pernyataan lisan maupun pernyataan tertulis tentang informasi-informasi antara lain: (1) Proyeksi dari kinerja keuangan; (2) Pengembangan bisnis perusahaan yang diharapkan; (3) Pertumbuhan rencana serta pelaksanaan visi; (4) Aktivitas *Merger* serta Akuisisi di masa mendatang dan pertumbuhan global; (5) Pendanaan bisnis serta proyek-proyek; (6) Penyelesaian dari proyek yang sedang berjalan, masih dalam pengembangan, atau sedang dalam pertimbangan; (7) Pembaharuan mengenai pelanggan, *supplier*, serta perjanjian material lainnya; (8) Likuiditas perusahaan di masa depan, persyaratan modal, modal kerja; serta (9) Hal lainnya yang berhubungan dengan kinerja bisnis perusahaan di masa mendatang. Terdapat 13 item pengungkapan informasi *forward-looking* (lihat Tabel 1) mengikuti acuan penelitian [Maghfira & Tresnaningsih \(2018\)](#) di mana merujuk pada Otoritas Jasa Keuangan ([Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016](#)).

Tabel 1. Pengungkapan Informasi *Forward-Looking*

No	Pengungkapan
1	Prospek Industri (Kualitatif): dilihat dari laporan tahunan tentang peluang industri perusahaan berupa aktivitas perusahaan di masa mendatang
2	Prospek Industri (Kuantitatif): dilihat dari laporan tahunan tentang angka atau persentase peluang industri perusahaan di masa mendatang
3	Prospek Ekonomi (Kualitatif): dilihat dari laporan tahunan tentang bagaimana peluang perkembangan ekonomi perusahaan di masa mendatang
4	Prospek Ekonomi (Kuantitatif): dilihat dari laporan tahunan tentang peluang pengembangan ekonomi perusahaan di masa depan dalam bentuk angka atau persentase
5	Proyek untuk Pasar Internasional (Kuantitatif): dilihat dari laporan tahunan tentang rencana strategi proyek perusahaan di masa depan dalam pemasaran di luar negeri
6	Proyek untuk Pasar Internasional (Kualitatif): dilihat dari laporan tahunan tentang rencana strategi proyek perusahaan di masa depan dalam pemasaran di luar negeri dalam bentuk angka atau persentase
7	Target dan Pendapatan: dilihat dari laporan tahunan tentang target dan pendapatan yang bisa tercapai di masa mendatang
8	Target dan Laba Terealisasi: dilihat dari laporan tahunan tentang target dan laba yang dapat terealisasi di masa mendatang
9	Target dan Struktur Modal Terealisasi: dilihat dari laporan tahunan tentang target dan struktur modal yang dapat terealisasi di masa depan
10	Proyeksi Pendapatan: dilihat dari laporan tahunan tentang gambaran pendapatan perusahaan di masa mendatang
11	Proyeksi Laba: dilihat dari laporan tahunan tentang gambaran laba yang akan tercapai di masa mendatang
12	Proyeksi Struktur Modal: dilihat dari laporan tahunan tentang gambaran struktur modal perusahaan di masa mendatang
13	Proyeksi Kebijakan Dividen: dilihat dari laporan tahunan tentang gambaran kebijakan dividen yang akan dilakukan perusahaan di masa mendatang

Sumber: Maghfira & Tresnaningsih (2018)

Perusahaan yang dikelola dengan baik akan dapat mengungkapkan Informasi *forward-looking*. Tata kelola perusahaan adalah mekanisme yang bertujuan memaksimalkan ekonomi perusahaan, yang terdiri dari relasi di antara dewan komisaris, manajemen serta pemilik saham yang berdampak positif pada kestabilan suatu perusahaan sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi (Tertius & Christiawan, 2015).

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) menjabarkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) ialah mekanisme guna mengendalikan dan mengarahkan agar operasional dari suatu perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan harapan dari pemangku kepentingan (IICG, 2013). Menurut Hamdani (2016), tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem dimana diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik berlandaskan pada Peraturan OJK Nomor 17 tahun 2023 memiliki prinsip-prinsip: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Tata kelola perusahaan merupakan suatu struktur serta proses yang mengarahkan serta mengendalikan perusahaan (International Finance Corporation, 2018). Tata kelola perusahaan dibentuk berdasarkan 4 pilar governansi korporat, meliputi perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021). Mekanisme tata kelola perusahaan berupa kepemilikan oleh institusional, kepemilikan oleh manajerial, komposisi dari dewan komisaris independen, serta kompetensi dari komite audit (Ginting, 2016). Mekanisme tata kelola perusahaan pada penelitian ini meliputi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

1. Komisaris Independen

Komisaris merupakan wakil dari pemegang saham, memiliki tingkatan tertinggi di suatu perusahaan. Komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris di mana tidak memiliki relasi bisnis apapun dengan perusahaan, oleh sebab itu komisaris independen memiliki sifat netral pada saat mengatasi konflik internal di perusahaan. Komisaris independen bertugas untuk menjamin adanya transparansi atas laporan keuangan perusahaan, serta menjalankan perilaku adil kepada semua pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57/PJOK.04/2017 menjelaskan baik buruknya suatu perusahaan dapat dilihat dari adanya komisaris independen dengan persentase minimal 30% dari anggota dewan komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Taliyang & Jusop (2011) mengungkapkan bahwa dewan komisaris berpengaruh baik untuk perusahaan karena keberadaannya mampu meningkatkan pengawasan dan

pemantauan pada perusahaan. Investor menilai kinerja manajer apakah telah bekerja dengan baik dan jujur melalui bantuan komisaris independen sehingga dapat mendorong manajer untuk meningkatkan pengungkapan informasi.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki manajer di dalam sebuah perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dalam mengawasi manajemen dapat dilakukan salah satunya adalah dengan adanya kepemilikan manajerial yang diharapkan mampu meminimalkan konflik keagenan (Melinda & Sutejo, 2008). Manajemen yang mempunyai saham perusahaan dapat berpartisipasi dengan cara menunjukkan kinerja maksimal sehingga konflik kepentingan yang timbul dengan investor bias berkurang dimana manajer merasa memiliki kepentingan yang sama dengan investor. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat membuat manajer lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi, karena manajer ikut memiliki saham perusahaan (Dzaraly et al., 2018). Manajer yang memiliki saham perusahaan diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menyajikan informasi mengenai perusahaan dengan selengkap mungkin (Liu, 2015).

3. Komite Audit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 menjelaskan komite audit merupakan komite yang ditunjuk dan dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bertanggung jawab pada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2016b). Komite Audit diharapkan secara berkala mengadakan rapat minimal satu kali dalam tiga bulan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015. Perusahaan setidaknya diharuskan minimal mempunyai anggota Komite Audit sebanyak tiga orang. Anggota dari komite audit meliputi anggota komisaris independen maupun pihak dari luar perusahaan yang tidak mempunyai kepentingan apapun. Pengawasan komite audit dilakukan dengan ketat dan independen sehingga pihak eksternal dan internal perusahaan publik tidak mudah untuk mempengaruhinya, sehingga mempermudah tugas auditor internal dan eksternal supaya terselesaikan dengan efektif. Sebelum terpublikasinya hasil audit, hasil temuan komite audit dibahas terlebih dahulu dengan auditor internal maupun dewan komisaris.

Hipotesis

Tata kelola perusahaan merupakan relasional dari manajemen, direktur, direksi, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya, dan dapat dijadikan cara oleh perusahaan dalam rangka meyakinkan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya telah terlindungi dengan baik (OECD, 2023). Perusahaan yang memiliki tata kelola baik mampu mendorong manajemen dalam mengungkapkan informasi perusahaan selengkap mungkin pada pemangku kepentingan (Ho & Taylor, 2013). Tata kelola perusahaan dalam pelaksanaannya, dibutuhkan mekanisme di mana dengan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik diharapkan manajer memberikan informasi dengan lengkap termasuk pengungkapan informasi *forward-looking*. Mekanisme tata kelola perusahaan adalah prosedur serta hubungan pihak yang membuat keputusan dengan pihak yang mengawasi keputusan tersebut (Trisusanti & Lasdi, 2018). Mekanisme tata kelola perusahaan pada penelitian ini adalah komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 menjelaskan bahwa komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris di luar perusahaan publik yang memenuhi kriteria yang ada (Otoritas Jasa Keuangan, 2016b). Jumlah komisaris independen yang banyak akan menjadikan perusahaan juga semakin baik pada saat pengawasan dan pengendalian manajemen, hal ini dapat berpotensi lebih baik dalam mengarahkan kegiatan manajerial untuk mencapai tujuan perusahaan (Jizi et al., 2014). Komisaris independen berfungsi untuk memberikan perlindungan atas hak-hak dari pemegang saham minoritas serta tekanan pihak lain yang merugikan perusahaan. Komisaris Independen yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibentuk untuk mengatur kinerja perusahaan yang dituntut memiliki profesionalitas dalam menjalankan tugas untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yang menimbulkan konflik keagenan dan dapat mendorong perusahaan dalam pengungkapan informasi *forward-looking*. Komisaris independen yang semakin banyak diharapkan mampu meningkatkan pengawasan kepada manajemen dalam memberikan informasi mengenai perusahaan termasuk pula informasi *forward-looking* (Muliawati & Rohman, 2018; Putri, 2019).

H1: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*

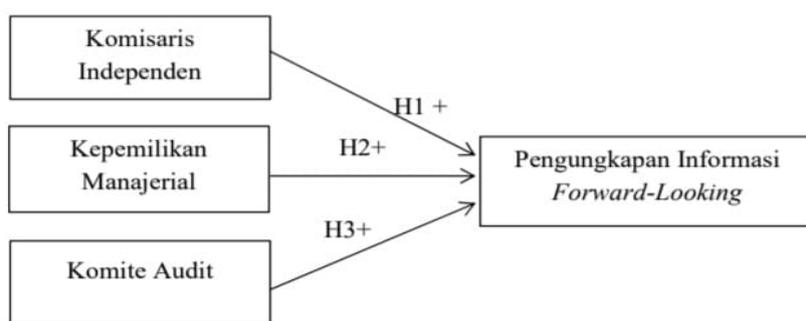
Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dimana aktif dalam suatu pengambilan keputusan di perusahaan (Imanta & Satwiko, 2011; Pujiati & Widanar, 2009; Wardana et al., 2023). Konflik keagenan di suatu perusahaan dapat diatasi dengan cara meningkatkan kepemilikan oleh manajerial. Pemegang saham memberikan kesempatan kepada manajer untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam kepemilikan saham perusahaan, dan menjadikan manajer memiliki kedudukan yang sama dengan pemegang saham lainnya. Manajer bukan lagi pihak luar perusahaan, namun juga pemilik perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajemen di mana manajer lebih memperhatikan dan mengungkapkan informasi lebih banyak seperti pengungkapan informasi *forward-looking*. Kepemilikan

manajerial yang semakin besar, maka manajer lebih merasa bertanggung jawab sehingga lebih transparan dan memberikan pengungkapan informasi *forward-looking* lebih banyak (Arianpoor et al., 2023).

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*

Komite audit merupakan komite di mana bertugas untuk membantu dewan pengawas suatu organisasi dalam rangka memastikan keefektifan sistem pengendalian internal serta an keefektifan tugas auditor internal dan eksternal (Hiro, 2004). Berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk mengangkat maupun memberhentikan komite audit (Otoritas Jasa Keuangan, 2016b). Anggota dari komisaris independen yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris ditunjuk sebagai Komite Audit. Setelah menyelesaikan tugasnya hasil audit tersebut dipublikasikan dan diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia selaku lembaga independent, bebas intervensi dalam melakukan wewenang dari pemerintah maupun pihak lain. Novia et al. (2021) mengatakan di mana frekuensi rapat komite audit yang semakin tinggi, maka semakin banyak pula pengungkapan oleh perusahaan. Hasil transparansi komite audit dapat memberikan informasi *forward-looking* yang akurat. Kondisi ini didukung beberapa penelitian yang menunjukkan komite audit memiliki positif terhadap pengungkapan informasi *forward-looking* (Abad & Bravo, 2018; Dzaraly et al., 2018; Liu, 2015; Putri, 2019; Rifai & Siregar, 2019).

H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*



Gambar 1. Model Penelitian

2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif, dengan dua variabel penelitian sebagai berikut:

1. Variabel dependen: Pengungkapan Informasi *Forward-Looking* (FWD)

Pengungkapan informasi *forward-looking* ialah pengungkapan di dalam laporan tahunan berisi informasi tentang prediksi kinerja bisnis dan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa depan perusahaan di mana bermanfaat bagi investor (Aljifri & Hussainey, 2007). Pengungkapan informasi *forward-looking* yang digunakan mengacu ke penelitian Maghfira & Tresnaningsih (2018) di mana meliputi 13 item pengungkapan (lihat Tabel 1). Perusahaan yang mengungkapkan item tersebut di laporan tahunan akan diberikan skor 1, sedang skor 0 untuk item yang tidak diungkapkan, kemudian dihitung menggunakan rumus:

$$FWD = \frac{\text{Total item yang diungkapkan perusahaan pada laporan tahunan}}{13}$$

2. Variabel independen: Mekanisme tata kelola perusahaan, meliputi:

- a. Komisaris Independen (KI) merupakan seseorang yang tidak terafiliasi dengan direksi serta direkrut tidak untuk mewakili siapapun, dan memiliki pengetahuan, keahlian, serta kemampuan yang dapat digunakan untuk kepentingan suatu perusahaan (Subrata, 2020). Pengukuran komisaris independen berdasarkan proporsi dari anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dibandingkan dengan seluruh anggota dewan komisaris.
- b. Kepemilikan Manajerial (KM) merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen di mana mereka secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan (Wardana et al., 2023). Pengukuran kepemilikan manajerial berdasarkan proporsi dari jumlah saham manajerial yang dibandingkan dengan total saham beredar.
- c. Komite Audit (KA) merupakan sekelompok yang dipilih untuk melakukan pekerjaan tertentu, atau menjalankan tugas-tugas khusus, atau sejumlah anggota dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab untuk membantu auditor dalam rangka mempertahankan independensinya (Setiawan et al., 2023). Pengukuran komite audit berdasarkan jumlah dari pertemuan rapat oleh komite audit selama tahun berjalan (Novia et al., 2021).

Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif yaitu laporan tahunan, di mana diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id). Obyek penelitian ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI periode 2018-2020 sebanyak 195 perusahaan. Objek dipilih perusahaan manufaktur dikarenakan siklus operasi pada perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga memiliki risiko lebih tinggi akan kepastian masa mendatang, sehingga pengungkapan informasi *forward-looking* sangat penting. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling method*, kriterianya: (1) perusahaan manufaktur terdaftar di situs BEI berturut-turut pada periode 2018-2020, di mana ditemukan 11 perusahaan tidak memenuhi; (2) laporan tahunan tersedia di situs BEI berturut-turut pada periode 2018-2020, di mana sebanyak 44 perusahaan tidak memenuhi, dan (3) perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan manajerial dimana terdapat 117 perusahaan tidak terpenuhi. Oleh karena itu diperoleh 23 perusahaan sampel, dengan 3 periode pengamatan sehingga total sampel sebanyak 69.

Analisis data digunakan analisis regresi linear berganda, di mana diolah melalui *software* SPSS versi 23, di mana tahapannya sebagai berikut: (1) Statistik Deskriptif untuk memberi gambaran data penelitian (Ghozali, 2018); (2) Uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, serta uji autokorelasi; (3) Uji Kelayakan Model: uji koefisien determinasi dan uji F; serta (4) Uji hipotesis (uji t).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi standar
FWD	69	0,308	1,000	0,77935	0,180908
KI	69	0,167	0,667	0,40830	0,104697
KA	69	2,000	33,000	7,26087	4,581459
KM	69	0,000	0,732	0,22607	0,275527

Sumber: Laporan Tahunan (diolah)

Hasil statistik deskriptif untuk pengungkapan informasi *forward-looking* menunjukkan nilai minimum 0,308, nilai maksimum 1 (100%, yaitu semua 13 informasi *forward-looking* diungkapkan). Nilai rata-rata Pengungkapan informasi *forward-looking* dengan nilai 0,779 (77,9%) menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel mengungkapkan 10 dari 13 informasi *forward-looking* yang ada. Apabila dicermati lebih lanjut, pengungkapan informasi *forward-looking* yang paling banyak dilakukan adalah pada pengungkapan Prospek Industri (Kualitatif) (item 2), Prospek Ekonomi (Kualitatif) (item 4), Target dan Pendapatan (item 7), dan Proyeksi Kebijakan Dividen (item 13).

Komisaris Independen menunjukkan nilai minimum 0,167, nilai maksimum 0,667, dan rata-ratanya 0,408, menunjukkan perusahaan sampel memiliki Komisaris independen rata-rata sebesar 40,7% dibandingkan total dari dewan komisaris dengan rata-rata berjumlah 3 Komisaris Independen di dalam perusahaan. Kondisi ini juga menunjukkan perusahaan sampel telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 ([Otoritas Jasa Keuangan, 2017](#)) dimana perusahaan publik diharuskan memenuhi ketentuan komisaris independen setidaknya 30% dibandingkan anggota dewan komisaris.

Kepemilikan Manajerial memiliki nilai minimum 0,000 (sebetulnya ada nilainya namun kecil sekali sehingga apabila dibulatkan menjadi 0.000), nilai maksimum 0,732, dan rata-rata sebesar 0,226, menunjukkan perusahaan sampel secara rata-rata memiliki kepemilikan manajerial sebesar 22,6% dari total saham yang beredar.

Komite Audit menunjukkan nilai minimum sebesar 2, nilai maksimumnya 33, dan rata-ratanya adalah 7,261, menunjukkan komite audit di perusahaan sampel rata-rata mengadakan rapat 7,261x dalam setahun (minimal tiap 2 bulan sekali melakukan rapat komite audit). Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel sudah memenuhi aturan dari OJK yaitu Peraturan OJK nomor 55/POJK.04/2015 di mana Komite Audit secara berkala diharapkan rapat setidaknya sekali tiap tiga bulan, atau minimal 4x dalam setahun, dan rata-rata perusahaan sampel 7,261x, hampir 2x nya.

Hasil uji Normalitas menunjukkan nilai dari *unstandardized residual* 0,640, di mana signifikansi 0,522, lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga disimpulkan data telah terdistribusikan dengan normal. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dari penelitian ini sebesar 0,120, berada di atas > 0,05, sehingga variabel penelitian bersifat homoskedestisitas dan baik untuk dilanjutkan.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerance	Simpulan
KI	1,008	0,992	Tidak terjadi multikolinearitas
KA	1,274	0,785	Tidak terjadi multikolinearitas
KM	1,269	0,788	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah

Uji multikolinearitas menunjukkan hasil dari VIF terlihat nilai *tolerance* lebih besar dan kurang dari 10 maupun 0,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

dU	DW	4-dU
1,670	1,721	2,330

Sumber: Data diolah

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai dari Durbin-Watson (DW) sebesar 1,721, sedangkan dU memiliki angka 1,670 dan 4-dU sebesar 2,330. Jadi dengan kata lain letak DW lebih besar dari pada dU dan DW juga lebih kecil dari pada 4-dU yang berarti penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R square	Std. Error of the Estimate
1.	0,477	0,228	0,192	0,162607

Sumber: Data diolah

Uji koefisien determinan menghasilkan *adjusted R square* 0,192, menunjukkan variabel independen penelitian dapat menerangkan variabel dependen sebanyak 19,2%, dan sisanya 80,8% diterangkan variabel lain yang ada di luar variabel pada penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji F

F	Signifikansi
6,389	0,001

Sumber: Data diolah

Uji F menunjukkan hasil tingkat signifikansi variabel yang digunakan pada penelitian ini 0,001, yaitu lebih kecil dibandingkan 0,05 jadi model dari penelitian ini layak.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Variabel Independen	Unstandardized coefficient		T	Sig	Simpulan
	B	Std Error			
(constant)	0,734	0,088	8,324	0,000	
KI	-0,175	0,189	-0,924	0,359	Tidak signifikan
KM	0,174	0,081	2,156	0,035	Signifikan, Positif
KA	0,011	0,005	2,202	0,031	Signifikan, Positif

Sumber: Data diolah

Dari hasil uji t, dapat dirumuskan persamaan regresi penelitian adalah:

$$FWD = 0,734 - 0,175 KI + 0,174 KM + 0,011 KA + \epsilon$$

Hasil uji hipotesis pada Tabel 7 menunjukkan Komisariss Independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*, sehingga H1 ditolak. Kepemilikan Manajerial menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*, sehingga H2

diterima. Komite Audit menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*, sehingga H3 diterima.

Komisaris independen tidak terbukti berpengaruh pada pengungkapan informasi *forward-looking*. Tugas komisaris independen sebagai pengawas dan independen yang tidak terafiliasi dengan pihak manapun seharusnya dapat membantu mengefektifkan pengawasan ke manajemen sehingga manajemen dapat menyajikan informasi selengkap mungkin termasuk informasi *forward-looking*, sehingga konflik keagenan antara manajemen dan investor dapat berkurang. Namun dalam penelitian ini tidak terbukti, dimana diduga komisaris independen yang ada kurang mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tidak mampu menekan pihak manajemen memberikan informasi selengkap mungkin termasuk informasi *forward-looking*. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Novia et al. \(2021\)](#) di mana menunjukkan komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan informasi *forward-looking*. Komisaris independen yang ada di perusahaan barulah sebatas formalitas untuk memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal, sehingga tidak mampu melakukan pengawasan ke manajer dan tidak mampu mendorong manajer untuk menyajikan informasi selengkap mungkin, termasuk informasi *forward-looking*. Kondisi ini didukung penelitian [Rustyaningrum & Rohman \(2021\)](#) di mana komisaris independen di perusahaan hanyalah formalitas untuk pemenuhan kewajiban. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [Muliawati & Rohman \(2018\)](#) serta [Putri \(2019\)](#) di mana menunjukkan komisaris independen memiliki pengaruh positif pada pengungkapan informasi *forward-looking*. Hasil penelitian juga didukung data penelitian dimana menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan informasi *forward-looking* perusahaan sampel cukup tinggi yaitu sebesar 77,9%, meskipun Komisaris independen yang ada di perusahaan rata-rata sebesar 40,8%, sedikit lebih tinggi sesuai aturan OJK yaitu 30%. Oleh karena itu meski Komisaris independen yang dimiliki perusahaan sampel tidak besar namun ternyata manajer tetaplah mengungkapkan informasi *forward-looking* dengan baik.

Kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*, dimana hasil penelitian sejalan dengan penelitian [Arianpoor et al. \(2023\)](#) yang juga menunjukkan pengaruh positif, dimana semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin besar pula pengungkapan informasi *forward-looking*. Namun hasil penelitian bertentangan dengan penelitian [Liu \(2015\)](#) di mana kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan informasi *forward-looking*, demikian pula penelitian [Dzaraly et al. \(2018\)](#) yang menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif pada pengungkapan informasi *forward-looking* diduga kepemilikan oleh manajer di perusahaan masih terlalu sedikit, oleh karena itu manajer bertindak oportunistik dimana tetap mengutamakan kepentingannya sendiri. Dugaan lainnya adalah pada penelitian sebelumnya peneliti memasukkan semua, baik perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial atau tidak, sehingga kepemilikan manajerial yang relatif sedikit mempengaruhi hasil penelitian, berbeda dengan penelitian saat ini di mana mengambil sampel perusahaan yang hanya memiliki kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial diharapkan mampu menjembatani konflik keagenan yang timbul di perusahaan. Investor sebagai pihak prinsipal memberikan kesempatan ke manajer untuk ikut memiliki saham perusahaan dengan harapan manajer akan merasa ikut memiliki perusahaan dan akan bertindak pula sebagai prinsipal, tidak hanya sebagai agen. Hal ini membuat manajer akan bekerja semaksimal mungkin termasuk mengungkapkan informasi sebanyak mungkin termasuk informasi *forward-looking* dan ini terbukti pada penelitian ini. Hasil ini juga didukung oleh data penelitian dimana menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan informasi *forward-looking* perusahaan sampel cukup tinggi yaitu sebesar 77,9%, dan rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 22,6% yang menunjukkan relatif cukup besar. Oleh karena itu, dengan kepemilikan manajerial yang relatif cukup besar ini mampu membuat manajer merasa ikut memiliki perusahaan sehingga manajer melakukan pengungkapan informasi *forward-looking* sebanyak mungkin.

Komite audit menunjukkan hasil pengaruh positif pada pengungkapan informasi *forward-looking*. Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya ([Abad & Bravo, 2018](#); [Dzaraly et al., 2018](#); [Lasisi et al., 2022](#); [Liu, 2015](#); [Novia et al., 2021](#); [Putri, 2019](#); [Rifai & Siregar, 2019](#)) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif pada pengungkapan informasi *forward-looking*, dimana apabila komite audit yang dimiliki oleh perusahaan semakin bagus, maka pengungkapan informasi *forward-looking* juga semakin banyak. Meskipun pengukuran yang digunakan berbeda-beda dimana [Dzaraly et al. \(2018\)](#) dan [Lasisi et al. \(2022\)](#) menggunakan ukuran komite audit, [Novia et al. \(2021\)](#) menggunakan frekuensi rapat seperti pada penelitian ini, [Abad & Bravo \(2018\)](#) serta [Liu \(2015\)](#) menggunakan keahlian akuntansi/keuangan, dan [Rifai & Siregar \(2019\)](#) menggunakan beberapa pengukuran mulai dari keahlian keuangan komite audit, frekuensi rapat yang dilakukan komite audit, serta ukuran dari komite audit, namun semua penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama yaitu komite audit berpengaruh positif pada pengungkapan informasi *forward-looking*. Namun, hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian [Ajibola \(2017\)](#) dan [Saha & Kabra \(2022\)](#) dimana menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi *forward-looking* dikarenakan komite audit belum menjalankan tugasnya dengan efektif, demikian pula penelitian [Lasisi et al. \(2022\)](#) yang menunjukkan komite audit yang diukur dengan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*. Komite audit diharapkan mampu bertindak sebagai pengawas di perusahaan sehingga dapat menjembatani konflik

keagenan yang timbul antara manajemen dan investor, dan kondisi ini terbukti dalam penelitian ini, dimana komite audit mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pengungkapan informasi *forward-looking* yang dilakukan manajer juga semakin banyak. Hasil ini juga didukung oleh data penelitian dimana menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan informasi *forward looking* perusahaan sampel relatif tinggi yaitu sebesar 77,9%, dan rata-rata nilai komite audit yang diwakili dengan frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit sebesar 7,261x selama setahun yang menunjukkan bahwa komite audit rutin melakukan rapat minimal dua bulan sekali, sudah memenuhi ketentuan dari OJK (Peraturan OJK nomor 55/POJK.04/2015), dimana diharuskan komite Audit untuk mengadakan rapat dengan rutin setidaknya sekali dalam tiga bulan. Komite audit di perusahaan sampel sering melakukan rapat untuk berkoordinasi dan ini mampu membuat komite audit menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mendorong manajer untuk melakukan pengungkapan informasi *forward looking* dengan baik.

4. SIMPULAN

Mekanisme tata kelola yang diwakili oleh komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*, ini menunjukkan meskipun komisaris independen memiliki tugas untuk pengawasan namun tidak mampu mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi *forward-looking*, dimana diduga kemungkinan karena komisaris independen yang ada masih sebatas formalitas, tidak memiliki keahlian yang memadai sesuai dengan tugas yang diemban. Mekanisme tata kelola yang diwakili kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*, dimana semakin besar kepemilikan manajerial maka manajer akan merasa ikut memiliki perusahaan dan menyajikan informasi selengkap mungkin termasuk informasi *forward-looking*, sehingga konflik keagenan berkurang. Demikian pula komite audit, dimana apabila semakin sering komite audit mengadakan rapat untuk berkoordinasi, maka dapat semakin intens dalam melakukan pengawasan sehingga bisa memacu manajer untuk melakukan pengungkapan lebih lengkap termasuk pengungkapan informasi *forward looking*.

Keterbatasan penelitian dimana untuk kriteria pemilihan sampel pada perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial membuat sampel penelitian yang ada menjadi sedikit sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian, hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian berikutnya untuk menggunakan kriteria lain atau memperpanjang periode penelitian sehingga diperoleh sampel lebih banyak yang dapat lebih mewakili perusahaan manufaktur. Pertimbangan lainnya juga bisa menggunakan mekanisme tata kelola yang lain seperti yang berhubungan dengan dewan direksi maupun kepemilikan di luar kepemilikan manajer seperti kepemilikan institusional, kepemilikan asing, atau konsentrasi kepemilikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abad, C., & Bravo, F. (2018). Audit Committee Accounting Expertise and Forward-Looking Disclosures. *Management Research Review*, 41(2), 166–185. <https://doi.org/10.1108/MRR-02-2017-0046>
- Aditya, H., & Meiranto, W. (2015). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Risk Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2014). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 177–186. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9572>
- Ahmad, R., & Sari, R. C. (2017). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka Integrated Reporting. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, VI(2), 125–135. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16654>
- Ajibola, J. O. (2017). Corporate Governance Attributes as Correlates of Disclosure of Forward- Looking Information on the Nigerian Stock Exchange. *World Journal of Finance and Investment Research*, 2(1), 1–15. [https://www.iiardjournals.org/get/WJFIR/VOL. 2 NO. 1 2017/CORPORATE GOVERNANCE.pdf](https://www.iiardjournals.org/get/WJFIR/VOL.2%20NO.1%202017/CORPORATE%20GOVERNANCE.pdf)
- Aljifri, K., & Hussainey, K. (2007). The Determinant of Forward Looking Information in Annual Reports of UAE Companies. *Managerial Auditing Journal*, 22(9), 1–26. <https://doi.org/10.1108/02686900710829390>
- Alkhatib, K. (2014). The Determinants of Forward-looking Information Disclosure. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(January), 858–864. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.554>
- Arianpoor, A., Lamloom, I. T., Khayoon, H. M., & Zaidan, A. S. (2023). The Impact of Material Internal Control Weaknesses, Institutional Ownership and Managerial Ownership on Future-Oriented Disclosure: Evidence from Islamic Economy. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, October. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2023-0052>
- CFA Institute. (2014). *Forward-Looking Information: A Necessary Consideration in the SEC's Review on Disclosure Effectiveness. Investor Perspectives*. CFA Institute. <https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/forward-looking-information-a-necessary-consideration-in-sec-review.ashx>
- Corporate Financial Institute. (2015). *Forward-Looking Statements Example*.

- corporatelineinstitute.com/resources/templates/word-templatestransactions/forward-looking-statements-example/
- Dzaraly, M., Lokman, N., & Othman, S. (2018). Corporate Governance Mechanism and Voluntary Disclosure of Strategic and Forward Looking Information in Annual Reports. *International Journal of Accounting, Finance and Business*, 3(15), 86–104. <https://ijafb.com/archived.asm?dataid=118&iDisplayStart=0&aaSorting=&isSearchDetail=1&dataidExtended=833&iDisplayStartExtend=0&aaSortingExtend=&isSearchDetailExtend=1>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258191>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26, 301–325. <https://doi.org/10.1086/467037>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2). <https://doi.org/10.55601/jwem.v6i2.347>
- Goenawan, G., Sastranegara, B. S., & Rizal, S. (2012). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan dalam Hubungannya dengan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada Pemda Kota Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 1–20.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and The Capital Markets: A Review of The Empirical Disclosure Literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1–3), 405–440. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0)
- Ho, P., & Taylor, G. (2013). An Empirical Analysis of Corporate governance and different types of voluntary disclosure. *Pacific Accounting Review, Emerald Group Publishing Limited*, 25(1), 4–29. <https://doi.org/10.1108/01140581311318940>
- IICG. (2013). *Good Corporate Governance dalam Prespektif Pengetahuan. Laporan Program Riset dan Pemingkatan Good Corporate Governance Perception Index 2012*. IICG.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Imanta, D., & Satwiko, R. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Manajerial. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 13(1), 67–80. <https://doi.org/10.34208/jba.v13i1.218>
- International Finance Corporation. (2018). *The Indonesia Corporate Governance Manual* (2nd ed.). International Finance Corporation.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Jizi, M. I., Salama, A., Dixon, R., & Stratling, R. (2014). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from the US Banking Sector. *Journal of Business Ethics*, 125, 601–615. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1929-2>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2021). *Intermediate Accounting* (4th ed.). John Wiley & Son.
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021*. In *Komite Nasional Kebijakan Governansi*. <https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/06/PUGKI-2021-LORES.pdf>
- Kustiani, N. . (2018). *Accounting in 5 minutes: Fundamental Quality of Accounting Information*. <https://klc.kemenkeu.go.id/accounting-in-5-minutes-fundamental-quality-of-accounting-information/>
- Lasisi, O. R., Olaoye, S. A., & Nwaobia, A. (2022). Corporate Governance, Firm Characteristics and Forward Looking Accounting Information Disclosure in Quoted Manufacturing Companies in Nigeria. *Caleb International Journal of Development Studies*, 5(1), 110–132. <https://doi.org/10.26772/cijds-2022-05-01-07>
- Liu, S. (2015). Corporate Governance and Forward-looking Disclosure: Evidence from China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 25, 16–30. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2015.10.002>
- Maghfira, A., & Tresnaningsih, E. (2018). An Analysis of Forward-looking Disclosures, Corporate Governance and The Ability to Anticipate Future Earnings: Empirical Evidence from Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 55(130–135).
- Melinda, F. I., & Sutejo, B. S. (2008). Interpendensi Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Instiusional serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan. *Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 167–182. <https://doi.org/10.24123/jmb.v7i2.127>
- Menicucci, E., & Guido, P. (2018). Forward-looking Information in Integrated Reporting: A Theoretical Framework. *African Journal of Business Management*, 12(18), 555–567. <https://doi.org/10.5897/AJBM2018.8643>

- Muliawati, A. C., & Rohman, A. (2018). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Ketepatan dan Keakuratan Pengungkapan Forward-Looking Information. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25592>
- Novia, I., Lukviarman, N., & Setiany, E. (2021). Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Forward-Looking Information. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 190–210. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i2.690>
- OECD. (2023). *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK. 04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*. Sekretariat Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*. Sekretariat Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-Bank-Umum/POJK-55-2016-Tata-Kelola-bank-umum.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016c). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik*. Sekretariat Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek. In *Ojk.Go.Id*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Tata-Kelola-Perusahaan-Efek-yang-Melakukan-Kegiatan-Usaha-sebagai-Penjamin-Emisi-Efek-dan-Perantara-Pedagang-Efek.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Tata-Kelola-Bagi-Bank-Umum/POJK-17-Tahun-2023-PENERAPAN-TATA-KELOLA-BAGI-BANK-UMUM.pdf>
- Priharjo, S. (2020). *Pengertian Laporan Tahunan, Isi, Fungsi, dan Perbedaannya dengan Laporan Keuangan*. <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-laporan-tahunan/>
- Pujiati, D., & Widanar, E. (2009). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan: Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi Ventura*, 12(1), 71–86.
- Putri, A. R. P. (2019). Pengaruh Independensi dalam Struktur Kepengurusan sebagai Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Forward-Looking Information pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia Tahun 2015-2017. *Semantic Scholar*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Pengaruh-Independensi-dalam-Struktur-Kepengurusan-Putri/b846004da1af6035fc50f9d9664284bf666d4a73>
- Rahmawati, I. N. (2015). Analisis Pengaruh Ukuran dan Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Informasi Masa Depan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 6(1), 59–81.
- Ramli, R. R. (2020). *Ini 3 Faktor Penyebab IHSG Terus Merosot Menurut OJK*. <https://money.kompas.com/read/2020/03/12/194300726/ini-3-faktor-penyebab-ihsg-terus-merosot-menurut-ojk>
- Rendi, R., & Suranta, S. (2017). Pengaruh Corporate Governance dan Deferred Tax Expense terhadap Earnings Management pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.254>
- Rifai, M., & Siregar, S. V. (2019). The Effect of Audit Committee Characteristics on Forward-Looking Disclosure. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 5(2021), 689–706. <https://doi.org/10.1108/JFRA-05-2019-0063>
- Rustyaningrum, N., & Rohman, A. (2021). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Terjadinya Financial Distress Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(2), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Saha, R., & Kabra, K. C. (2022). Corporate Governance and Voluntary Disclosure: Evidence from India. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(1), 127–160. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2020-0079>
- Sembiring, C. L. (2017). Manajemen Laba dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Komisaris Independendan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 20–41.
- Setiawan, R., Pratama, A. B. L., & Prasetya, Y. A. (2023). Peran Wanita pada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit dalam Mempengaruhi Kinerja dan Risiko Bank. *Media Bina Ilmiah*, 17(11), 2709–2722. <https://doi.org/10.33758/mbi.v17i11.433>
- Subrata, A. (2020). *Peran Komisaris Independen di Perusahaan Asuransi*. <https://icopi.or.id/peran-komisaris->

independen-di-perusahaan-asuransi

- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Gajah Mada University Press.
- Suwardjono. (2017). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan (Ketiga)*. BPFE.
- Taliyang, S. M., & Jusop, M. (2011). Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure: Evidence in Malaysia. *International Journal of Business and Management*, 6(12), 109–117. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n12p109>
- Tertius, M. A., & Christiawan, Y. J. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan. *Business Accounting Review*, 3(1), 223–232.
- Trisusanti, D., & Lasdi, L. (2018). The Effect Corporate Governance Mechanism and Accounting Conservations on Tax Avoidance. *Research in Management and Accounting*, 1(2), 114–124.
- Tunggal, A. W. (2012). *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*. Harvarindo.
- Ulfah, F. U. (2020). *Rapor IHSG 2020 vs 2019: Turun 5 Persen, Kapitalisasi Pasar Amblas Rp278 Triliun*.
- Uyar, A., & Karamahmutoğlu, M. K. (2012). Value Relevance of Voluntary Disclosure: Evidence from Turkish Firms. *Journal of Intellectual Capital*, 13(3), 363–376. <https://doi.org/10.1108/14691931211248918>
- Wardana, A. A. B. A., Verawati, Y., & Bhegawati, D. A. S. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden, Kebijakan Hutang dan Investment Opportunity Set terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021. *Kharisma*, 5(2), 260–276.